

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul.....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pengesahan.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pengesahan Penguji.....</b>	<b>iii</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>vi</b>
<b>Daftar Isi.....</b>	<b>x</b>
<b>Daftar Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>xiii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	5
1.4. Kajian Pustaka.....	5
1.4.1. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	5
1.4.2. Diversi.....	7

1.4.3. Pengertian Anak.....	9
1.4.4. Pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum.....	14
1.5. Metode Penelitian.....	17
1.6. Sistematika Penulisan.....	21

## **BAB II MEKANISME DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

### **ANAK**

2.1. Konsep Diversi menurut Sistem Peradilan Pidana Anak .....	23
2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	37
2.2.1. Struktur Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Anak.....	44
2.3. Pengaturan yang Terkait dengan Diversi.....	49
2.4. Proses Tahapan Pelaksanaan Diversi.....	56
2.5. Hambatan yang Ditimbulkan dalam Proses Penerapan Diversi dalam SPPA.....	61
2.5.1. Hambatan Internal.....	61
2.5.2. Hambatan Eksternal.....	63

## **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK DALAM PROSES DIVERSI**

3.1. Hak-Hak Anak.....	65
3.1.1. Hak Anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak.....	68
3.1.2. Hak Anak dalam UU SPPA dan Perlindungan Anak.....	73
3.2. Regulasi di Tingkat Penegak Hukum yang Mendukung Perlindungan Anak.....	77
3.2.1. Di Tingkat Kepolisian.....	77
3.2.2. Di Tingkat Kejaksaan.....	89
3.2.3. Di Tingkat Pengadilan.....	91
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1. Kesimpulan.....	97
4.2. Saran.....	98
<b>DAFTAR BACAAN.....</b>	99

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan  
Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Republik Indonesia  
Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik  
Indonesia dan Mengubah Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan  
Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang  
Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiaawi dan  
Merendahkan (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or  
Degrading Treatment or Punishment*)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan  
Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum  
Berumur 12 (dua belas) Tahun.